



Dinamika Kontestasi Elektoral Pilkada DAERAH KHUSUS IBUKOTA Jakarta 2017-2022 : Studi Atas Friksi Politik- Agama dan Pembentukan Jejaring Konstituen Anies-Sandi

Sofyan Sawri*

Program Studi Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga, Indonesia

Abstrak

Studi ini menelaah ihwal friksi politik dan agama pada kontestasi pemilihan gubernur DAERAH KHUSUS IBUKOTA Jakarta 2017, pemilihan gubernur Jakarta menjadi momentum politik nasional yang menggambarkan kenyataan menarik. Mengkaji perihal kemenangan Anies-Sandi pada dasarnya sangat berkaitan dengan faktor agama. Adapun permasalahan yang diteliti pada studi ini, yang pertama ialah friksi politik yang melibatkan isu agama serta kelompok-kelompok Islamis yang membawa efek signifikan terhadap proses pemenangan Anies-Sandi. Lalu, pembentukan simpul dan jaringan yang merupakan imbas dari rentetan demonstrasi politik identitas menghasilkan superioritas identitas agama dalam politik praktis. Teori untuk menganalisis permasalahan tadi ada dua yaitu teori jaringan politik serta teori strategi politik. Metode penelitiannya ialah kualitatif menggunakan sifat penelitian yang berbentuk deskriptif-analisis dan bersumber dari data primer dan sekunder. Dari analisis data terlihat bahwa temuan yang pertama ialah kemenangan Anies-Sandi ditimbulkan oleh friksi aktor politik yang dibentuk oleh jejaring Anies-Sandi serta menguatnya populisme Islam. Kedua, yaitu kampanye Anies-Sandi yang memperlihatkan kebijakan pro rakyat seperti program Oke Oce serta penolakan reklamasi dan penggusuran tempat tinggal rakyat dan mereka berhasil menarik hati pemilih milenial dan rakyat kelas bawah. Kemenangan Anies-Sandi di putaran ke-2 juga tidak terlepas oleh adanya limpahan suara dari pasangan nomor urut satu yaitu Agus-Silvi.

Kata Kunci: Friksi Politik, Jaringan, Pilkada DAERAH KHUSUS IBUKOTA

Abstrak

This study examines the political and religious friction in the 2017 DAERAH KHUSUS IBUKOTA Jakarta governor election contestation, Jakarta governor election being a national political momentum that illustrates an interesting reality. Studying about Anies-Sandi's victory basically is closely related to religious factors. As for the problems examined in this study, the first is political friction involving religious issues as well as Islamist groups which have a significant effect on the process of winning Anies-Sandi. Then, the formation of nodes and networks which are the effects of a series of demonstrations on identity politics produce superiority of religious identity in practical politics. There are two theories to analyze the problem, namely political network theory and political strategy theory. The research method is qualitative using the nature of research in the form of descriptive-analysis and sourced from primary and secondary data. From the analysis of the data it appears that the first finding was that Anies-Sandi's victory was caused by the friction of political actors formed by the Anies-Sandi network and the strengthening of Islamic populism. Second, namely the Anies-Sandi campaign which shows pro-people policies such as the Oke Oce program and the refusal of reclamation and eviction of people's homes and they have succeeded in attracting the hearts of millennial voters and lower class people. Anies-Sandi's victory in the second round was also inseparable by the abundance of votes from pair number one, namely Agus-Silvi.

Password: Political Friction, Network, Election Governor of DAERAH KHUSUS IBUKOTA

How to Cite: Sawri, S. (2020). Friksi Politik-Agama Dalam Kontestasi Elektoral Pilkada DAERAH KHUSUS IBUKOTA Jakarta 2017-2022 : Studi Atas Pembentukan Jejaring Konstituen Anies-Sandi, *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 12 (1): 14-27

*Corresponding author:

E-mail: betasofyan.matraindonesia@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2017 lalu menampilkan fenomena politik menarik. Pemilihan yang digelar beriringan dengan 101 daerah lain di Indonesia itu menyuguhkan kekuatan politik sentimen ketimbang argumen rasional. Pertarungan wacana di kalangan masyarakat, terutama di media sosial, terus memunculkan isu sentimen sektarian. Bahkan, Pilkada DAERAH KHUSUS IBUKOTA itu seolah miniatur dari perlawanan tidak langsung beberapa kubu dengan memunculkan isu sensasional-reaksioner, seperti isu agama.

Pada penghujung 2016 lalu, peristiwa pergolakan politik dengan domain agama menuliskan ihwal baru dalam sejarah demokratisasi di Indonesia. Jelang Pilkada DAERAH KHUSUS IBUKOTA Jakarta 2017, kalangan Islam melakukan demonstrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia dengan jumlah massa ratusan ribu hingga jutaan orang. Demonstrasi tersebut dijuluki sebagai Aki Bela Islam yang digelar sebanyak tiga kali. Aksi demikian dilakukan sebagai reaksi terhadap Ahok selaku Gubernur DAERAH KHUSUS IBUKOTA Jakarta yang melontarkan ucapan kontroversial ketika sedang melakukan pidato kedinasan di Kepulauan Seribu. Aksi protes terhadap Ahok tersebut dijalankan oleh kalangan Muslim pada 17 Oktober 2016, 4 November 2016, dan 2 Desember 2016. Aliansi kelompok Islam yang memprotes perkataan Ahok karena dinilai menista Islam adalah

antara lain Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), dan puluhan organisasi Islam lain (Kusumo & Hurriyah, 2018).

Kasus penistaan agama yang mengakibatkan Ahok di penjara itu ternyata menjadi efek gunung es dalam eskalasi politik DAERAH KHUSUS IBUKOTA Jakarta. Pertarungan memperebutkan DAERAH KHUSUS IBUKOTA 1 dan DAERAH KHUSUS IBUKOTA 2 semakin sengit dan panas. Bahkan, isu yang kemudian terus berkembang dalam percakapan publik justru banyak bersinggungan terkait sentimen Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

Kasus penistaan agama Ahok telah mengakibatkan gesekan-gesekan baru yang melahirkan instabilitas politik sehingga menjadi ancaman serius terhadap keamanan nasional. Muncul pula kekhawatiran akan benturan konfrontasi horizontal yang mengatasnamakan agama dalam Pilkada DAERAH KHUSUS IBUKOTA Jakarta. Sehingga, atas pertimbangan tersebut, maka sejumlah 30.000-an perwira militer serta polisi dikerahkan untuk mengantisipasi kerusuhan jelang dan pasca pemilihan.

Bagaimanapun, kasus penistaan agama telah memangkas angka elektabilitas Ahok secara signifikan. Jejak pendapat Indikator Politik Indonesia menyampaikan bahwa 57 % responden setuju jika Ahok dikatakan telah menghujat agama, sehingga pilihan mereka akan jatuh kepada pasangan calon lain, yaitu Anies-Sandi yang memang sejak awal direpresentasikan sebagai sosok muda

agamis yang santun, ramah, dan cerdas. Potensi suara yang demikian itu dimanfaatkan oleh jejaring politik Anies untuk meraup simpati konstituen. Usaha tersebut kelihatan menuai hasil. Pada putaran pertama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Anies-Sandi berhasil bersaing dengan Ahok-Djarot untuk lanjut ke putaran kedua, sementara AHY-Sylvi mesti terhenti di putaran pertama.

Oleh sebab itu, Pilkada DAERAH KHUSUS IBUKOTA Jakarta telah membidani lahirnya sejumlah bentuk friksi, khususnya berkaitan dengan interaksi antara politik dan agama. Buktinya, "teror teologis" banyak berlangsung di khutbah-khutbah Jumat sebagai medium untuk kampanye dan propaganda hingga larangan mengurus, mendoakan, dan menyolati jenazah yang sewaktu hidup mendukung pasangan calon tertentu. Friksi tersebut lahir karena politik identitas lahir melalui meningkatnya *hate speech*, intoleransi, perlawanan (konfrontasi), hingga mengakibatkan perpecahan di masyarakat. Pada saat yang sama, lahirnya friksi tersebut dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memuluskan hajat politik demi memenangkan kandidat yang diusungnya.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana friksi politik terbentuk dan dimanfaatkan oleh jejaring konstituen untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2017-20122.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Data kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan tertulis atau lisan dari masyarakat atau institusi yang menjadi objek penelitian. Dengan berdasar pada data yang diperoleh, maka atas data tersebut dibangun hipotesis dan teori.

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan *Sampling Purposive*. Dengan demikian peneliti akan melakukan proses wawancara terhadap beberapa informan kunci. Seperti ketua tim pemenangan Anies-Sandi, Pengurus partai Gerindra dan juga kepada pengurus Front Pembela Islam (FPI). Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelang Pemilihan Gubernur Jakarta yang diikuti oleh tiga kandidat, tensi politik semakin tinggi. Isu etnis, agama, ras, golongan (SARA) mulai menonjol seiring dengan tanggapan masyarakat di pelbagai media, khususnya di media sosial. Isu-isu yang berkembang merupakan senjata untuk mengalahkan Ahok misalnya isu mengenai larangan dalam muslim untuk memilih Ahok karena ia kafir dan beretnis Tionghoa. Serangan balik yang dilakukan Ahok terhadap isu rasisme yang mengarah kepadanya justru mempertajam friksi politik agama.

Tanggal 7 Oktober 2016, Ahok dilaporkan ke polisi dengan tuduhan telah menistakan agama Islam. Berselang tiga hari berikutnya, Ahok memohon maaf karena ucapannya itu, meskipun ia sendiri merasa tidak bersalah sebab ia tidak bermaksud melecehkan agama Islam. Kendati demikian, pelbagai kelompok Islam justru tidak menyambut permohonan maaf Ahok dan mendorong polisi untuk secepatnya memproses Ahok secara hukum.

Pada pertengahan Oktober 2016, puluhan ribu massa melakukan demonstrasi dan mendesak polisi untuk segera memenjarakan Ahok. Menanggapi hal itu, ada yang setuju terhadap langkah yang dilakukan oleh ormas-ormas tertentu. Tetapi, sebagian yang lain justru menyatakan bahwa pernyataan Ahok tersebut tidak bermaksud menistakan Islam. Itulah friksi politik dan agama yang terjadi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pergesekan politik dan agama inilah kemudian yang memicu anjloknya dukungan suara terhadap Ahok. Sementara itu, hal tersebut dimanfaatkan oleh Anies-Sandi untuk menaikkan jumlah suaranya.

Sentimen Identitas Sebagai Simpul Jejaring Konstituen Islam

Setidaknya, indikasi penggunaan politik identitas di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Ibukota Jakarta bermula ketika penggalan video pernyataan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tentang Surah Al-Maidah 51 dipublikasikan di akun media social yang bernama Buni Yani, tertanggal 6 Oktober 2016. Meskipun

pernyataan Ahok itu diucapkan jauh sebelum Pilkada, tetapi secara laten hal itu menjadi "pemanasan" awal dari penggunaan politik identitas dalam Pilkada Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2017.

Politisasi identitas dilakukan untuk mendapat keuntungan elektorat sehingga bisa merebut dan mempertahankan kekuasaan. Kemenangan pasangan Anies-Sandi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2017 merupakan salah satu bukti nyata bahwa politik identitas bisa diaplikasikan sebagai strategi akurat untuk mengalahkan lawan politiknya. Pernyataan Ahok mengenai Surah Al-Maidah 51 merupakan pemicu yang melahirkan politisasi identitas dalam suatu kontestasi politik.

Dalam kasus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2017, politik identitas dimanfaatkan oleh para aktor politik untuk memobilisasi masyarakat agar tidak mendukung pasangan calon lain. Oleh karena itu, melalui politik identitas, masyarakat digiring untuk memberi dukungan terhadap pasangan calon yang memiliki kesamaan identitas dengan mayoritas masyarakat Jakarta.

Dalam konteks Pemilihan Umum Kepala Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, penggunaan politik identitas dapat ditinjau pada dua pola; secara samar-samar dan terang-terangan. Statemen Anies Baswedan dalam kunjungannya ke markas Front Pembela Islam (FPI) secara implisit mengandung indikasi pada arah politik identitas. Dalam pidatonya, Anies mengunggulkan ras tertentu ketimbang ras lainnya, ras tersebut

ialah suku Arab. Berikut ini merupakan penggalan narasi pidato Anies Baswedan di markas Front Pembela Islam (Malaikat, 2018):

“Mereka menyatakan sumpah Tanah Air Indonesia sebelum Indonesia-nya ada. Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali keturunan Arab di Indonesia. Enggak ada. Dan ini siapa yang melakukan? Semua kelompoknya ”

Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Ibukota Jakarta, meskipun pasangan calon tidak secara terus-terang mempraktikkan politik identitas, tetapi tendensi dari praktik tersebut dapat terlihat. Setelah putaran pertama berlangsung dengan kemenangan pasangan nomor urut dua, yakni Ahok-Djarot memperoleh 42,99 persen, terlihat jelas bahwa Anis-Sandi mendapatkan keuntungan dari praktik politik identitas. Ini artinya, pernyataan Ahok mengenai surah Al-Maidah memiliki konsekuensi elektoral. Tidak hanya itu, identitas dia sebagai keturunan Tionghoa yang notebene beragama Kristen akan “digoreng” oleh lawan-lawan politiknya.

Pasangan Anies-Sandi menyadari bahwa hal itu merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan kekuatan Ahok. Sebab, pada bulan September 2016, sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Ibukota Jakarta putaran pertama diselenggarakan elektabilitas Ahok mencapai 68,72 persen (Ibrahim, 2016). Elektabilitas tersebut diperoleh melalui kepuasan publik terhadap kinerja Ahok. Hasil survei ini memberi ilustrasi bahwa untuk menumbangkan Ahok diperlukan strategi yang jitu, yakni menggunakan isu Suku, Agama,

Ras dan Antargolongan (SARA). Inilah yang dikapitalisasi oleh lawan-lawan politik Ahok untuk menurunkan elektabilitasnya.

Sebagai konsekuensinya, nada-nada sumbang tentang Ahok tersebar, baik dalam media sosial maupun dalam realitas sehari-hari kehidupan masyarakat Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Slogan-slogan rasial digunakan untuk menumbangkan petahana, misalnya “Ahok sumber masalah, ganyang Cina” atau “Haram pemimpin kafir, tolak Ahok” (CNN Indonesia, 2016).

Adapun yang paling santer mengampanyekan isu SARA ialah Ormas Islam yang dipimpin oleh Habib Rizieq yakni FPI (Front Pembela Islam). Bahkan, jauh sebelum Pilkada 2017 diselenggarakan, Front Pembela Islam (FPI) telah menyuarkan kampanye berbau rasial dengan membentuk GMJ (Gerakan Masyarakat Jakarta) menolak Ahok. Selain Habib Rizeq, terdapat oknum-oknum yang dengan terang-terangan mengkampanyekan isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Mereka di antaranya ialah Ahmad Dhani, Kivlan Zein, Didin Hafiduddin, dan Suryo Prabowo.

Hal ini terkonfirmasi dari statemen Rizieq Sihab pada salah satu ceramahnya mengatakan bahwa pertarungan antara Anies dan Ahok cuma persoalan kecil. Yang lebih besar daripada itu ialah tentang membela agama yang diyakini. Cagub dukungan umat memiliki peluang yang besar dan lawan politik berusaha mencurangnya sehingga harus dikawal bersama (Solehudin, 2017)

Pernyataan mengenai “membela agama” dan “penista agama” secara tak langsung mengisyaratkan makna

politis. Dikarenakan “penista agama” mengarah pada Ahok, sementara “pembela agama” tertuju pada Anies. Meskipun, sejumlah elite politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tidak mengakui, tetapi pertemuan Anies dengan Rizieq dan pernyataan Rizieq sendiri merupakan fakta politis yang secara implisit dapat dikatakan bahwa sentral penyebaran isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) berasal dari kubu Anies-Sandi.

Dengan mengamati realitas tersebut, Pemilihan Umum Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada dasarnya mengilustrasikan bahwa politik identitas menjadi langkah akurat untuk merebut kekuasaan. Akan tetapi, konsekuensi yang akan ditanggung adalah demokrasi menjadi sakit. Sebab, ruang publik tidak lagi menjadi ranah perdebatan yang ideal, melainkan hanya sebatas arena kebencian. Sebagai konsekuensinya, terjadi gejala di tengah-tengah masyarakat yang menyebabkan munculnya ujaran kebencian (*hate speech*) dan ucapan sarkastik seperti “monyet”, “kafir” “anjing”, “Cina”,, “mulut jamban” dan lain sebagainya (Juditha, 2017, p. 149). Problem yang demikian itu menjadi potensi terhadap munculnya konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat.

Dengan demikian, konstelasi politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Ibukota Jakarta diperkeruh oleh merebaknya sentimen identitas. Inilah yang dimanfaatkan oleh pasangan Anies-Sandi. Sehingga, konstituen mereka rata-rata tersimpul oleh identitas. Hal ini dapat diperhatikan melalui hasil survei yang menemukan bahwa

kecendrungan masyarakat memilih Anies-Sandi karena faktor agama.

Dampak Elektoral Friksi Politik-Agama di Aksi Bela Islam 411 dan 212 Pada Kemenangan Anies-Sandi

Aksi Bela Islam adalah gerakan politik. Sebab, aksi ini tidak terjadi secara tiba-tiba, spontan, dan seketika. Ada pemicu yang mendasarinya, yakni memenjarakan penista agama “Ahok” sehingga tidak bisa melenggang maju menjadi gubernur. Meskipun Ahok masih bisa ikut lanjut dalam kontestasi politik pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DAERAH KHUSUS IBUKOTA Jakarta sampai putaran kedua, namun massa setidaknya telah memberi *public pleasure* yang dapat melemahkan kekuatan Ahok.

Intrik kepentingan politik semakin tampak tatkala terdapat beberapa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang menjadi inisiator dan penggerak Aksi Bela Islam memiliki afiliasi politik terhadap partai tertentu. Ormas yang menjadi inisiator tersebut di antaranya yaitu FPI (Front Pembela Islam) atau GNPF-MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia) (Prayogi & Adela, 2019, p. 32). Sedangkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang memakai narasi dan simbol Islam untuk memobilisasi Aksi Bela Islam 411 dan 212 terdiri dari GNPF-MUI (FPI, HTI, PKS, MMI Tarbiyah), Majelis Pelayanan Masyarakat (Gerakan Masyarakat Jakarta-GMJ), Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah untuk Gubernur Muslim Jakarta, Badan Kerjasama Pesantren Indonesia, Al-Irsyad, FS LDK (Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus), Wahdah Islamiyah dan Majelis Intelektual serta Ulama

Muda. Di sisi lain, adapun Ormas yang memakai narasi dan simbol NKRI dalam Aksi Bela Islam 212 diantaranya Gerakan Nasional Penjaga Fatwa Ulama Indonesia atau GNPf-MUI (FPI, HTI, FUI, PKS, MMI), Aksi Bersama Rakyat (AKBAR), Jaringan Merah Putih (GMP)/Gerindra, Forum Betawi Rampung (FBR), Gerakan Bela Negara, dan Gerakan Indonesia Beradab (Pamungkas & Oktaviani, 2017, p. 68).

Jika dilihat dari komposisi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang ikut serta dalam aksi ada sebagian yang jelas terafiliasi secara politik dengan partai politik tertentu. Malahan, dalam aksi bela Islam tampak sejumlah elite politik yang ikut berpartisipasi, salah satunya ialah Fahri Hamzah (Kader PKS) dan Fadli Zon (Kader Gerindra). Nuansa politis dalam Aksi Bela Islam kian kentara tatkala Fahri Hamzah berkolaborasi dengan GNPf MUI berorasi: "Jatuhkan presiden itu ada dua cara, pertama lewat parlemen ruangan dan kedua lewat parlemen jalanan" (Hakim, 2016).

Orasi Fahri tersebut secara gamblang memuat kepentingan politik. Dari hal ini bisa dipahami bahwa Aksi Bela Islam tidak sepenuhnya murni membela agama, melainkan sarat kepentingan politik yang menungganginya. Bahkan, Fadli Zon sendiri mengakui bahwa dalam aksi itu diikuti banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, baik dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya/Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan PKS (Widhana, 2016). Para anggota dewan yang terlibat di antaranya ialah Fahira Fahmi Idris (Wakil Ketua Komite III DPD RI), Andi Mappetahang Fatwa atau AM Fatwa (politisi PAN dan juga menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan DPD

RI), Ali Mochtar Ngabalin (politikus Partai Golkar, juga Abraham Lunggana atau Haji Lulung (politisi PPP yang menjadi Wakil Ketua DPRD Daerah Khusus Ibukota Jakarta).

Selain beberapa nama di atas, terdapat sejumlah politisi yang terlibat juga dalam Aksi Bela Islam. Antara lain, Amien Rais (Ketua Dewan Kehormatan PAN dan mantan Ketua Umum DPP PAN), Rhoma Irama (Ketua Umum Partai Idaman), Sodik Mudjahid (Ketua DPP Partai Gerindra), Lucky Hakim (politisi PAN), serta Adhyaksa Dault (mantan Menteri Pemuda dan Olahraga).

Keterlibatan mereka dalam Aksi Bela Islam mengindikasikan bahwa ada usaha untuk menekan Ahok demi kemenangan Anies-Sandi maupun Agus-Silvi. Sebab, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sendiri merupakan partai pengusung pasangan Anies-Sandi. Bahkan, mereka berdua menjadi partai oposisi. Terlepas dari hal tersebut, sebagaimana diakui oleh Mardani Ali Sera selaku politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang didapuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi mengatakan bahwa Aksi Bela Islam memberi dampak elektoral. Namun, menurutnya dampak elektoral tersebut tidak serta merta didapat oleh pasangan Anies-Sandi belaka. Sebab, pasangan Agus-Silvi juga dapat menikmati efek Al-Maidah 51 (Hasil Wawancara dengan Mardani Ali Sera, pada 10 April 2018).

Dalam pengakuannya, Mardani menyampaikan bahwa seandainya pun Ahok tidak *blunder* tentang Al-Maidah 51, pihaknya memiliki strategi jitu untuk memenangkan pasangan Anies-Sandi, yaitu dengan tawaran program

yang hebat seperti OK-OC (*One Kecamatan One Center of Entrepreneurship*). Pernyataan Mardani Ali tersebut terlegitimasi melalui hasil survei yang dilakukan oleh Populi Center yang dilakukan di tanggal 19 April 2019 pada pencoblosan putaran kedua dengan jumlah responden 2.000 orang. Survei tersebut menemukan fakta bahwa 51,3% warga Daerah Khusus Ibukota Jakarta memilih calon merujuk pada program dan visi-misinya. Sementara itu, 11,8% memilih dengan merujuk kepada faktor kesamaan agama. Hasil survei yang dilakukan oleh Populis Center ini mengilustrasikan bahwa visi-misi dan program kerja masih menjadi preferensi utama dalam memilih calon gubernur (Yulika, 2017). Ini artinya ada sinergitas antara pernyataan Mardani Ali Sera dengan temuan survei dari Populi Center.

Kendati demikian, menurut survei yang dilaksanakan oleh Media Survei Nasional (Median) ditemukan bahwa sekitar 27,1% warga Daerah Khusus Ibukota Jakarta memilih Anies-Sandi sebab se-agama dan 25,9% dengan dalih bahwa yang penting bukan Ahok. Hal ini selaras dengan temuan SMRC di mana faktor agama yang menjadi penentu warga Daerah Khusus Ibukota Jakarta memilih pasangan Anies-Sandi 32,4 persen (Katadata, 2017; Median, 2017). Dua temuan lembaga survei tersebut membuktikan bahwa apa yang disampaikan Mardani Ali Sera tidak cocok dengan kenyataan di lapangan. Sebab, simpul kekuatan konstituen Anies-Sandi terletak pada identitas agama dan sentiment primordial.

Unggulnya Anies-Sandi di putaran kedua mengilustrasikan

bahwa peta kekuatan dalam politik bersifat dinamis. Konstelasi politik gampang berubah tergantung situasi yang memungkinkan kepentingan bisa tercapai. Menjelang pemilihan gubernur di putaran kedua, Mardani mengafirmasi bahwa pasangan Anies-Sandi mendapat limpahan suara dari pemilih pasangan Agus-Silvi. Bahkan, Mardani sendiri menyatakan bahwa hampir seluruh suara dari Agus-Silvi berpindah pada pasangan Anies-Sandi (Wawancara dengan Mardani Ali Sera.).

Berdasarkan rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPU, pada putaran pertama masing-masing calon mendapat suara, Agus-Silvi (17,06 %), Ahok-Djarot (42,96%), Anies-Sandi (39,97%) (KPU, 2017a). Sedangkan pada putaran kedua, Ahok meraup suara 42,05%, dan Anies-Sandi 57,95%. Ini artinya, suara Ahok stagnan dari putaran pertama hingga kedua. Sementara Anies-Sandi meningkat 18,01 persen (KPU, 2017b). Dengan demikian, nyaris semua suara pasangan nomor urut satu di putaran pertama yang berjumlah 937.950 berpindah ke pasangan Anies-Sandi di putaran kedua. Bahkan, sebagian suara dari pasangan nomor urut dua pun ikut berpindah ke pasangan nomor urut tiga. Jika mengikuti temuan survei SMRC (faktor agama yang menjadi penentu warga Daerah Khusus Ibukota Jakarta memilih pasangan Anies-Sandi 32,4%) dan Median (27,1% warga Daerah Khusus Ibukota Jakarta memilih Anies-Sandi karena se-agama dan 25,9 % dengan alasan yang penting selain Ahok) karenanya dapat ditarik benang merah bahwa yang menjadi faktor utama dari dinamika tersebut adalah karena semakin menguatnya sentimen anti-Ahok dan identitas.

Kedua sentimen tersebut lambat laun disurakan dalam momentum Aksi Bela Islam. Dalam hal ini, Aksi Bela Islam menjadi momentum yang mengubah konstelasi politik DAERAH KHUSUS IBUKOTA Jakarta menjelang Pilkada 2017. Itulah imbas elektoral dari Aksi Bela Islam yang menguntungkan pasangan Anies-Sandi.

Populisme Islam dan Kemenangan Elektoral Anies-Sandi

Trajektori kemenangan Anies-Sandi tidak hanya mengandalkan pada kalkulasi matematis suara daripada jaringan pendukungnya, tetapi juga dipengaruhi oleh politik populis. Gerakan politik populis pada Pilkada Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki orientasi untuk mengganti Ahok karena diklaim sebagai figur nir-kelembutan, keras, pro China, suka menggusur. Menurut Supriatma (2017), politik populis memanfaatkan instrumen gerakannya melalui jaringan pinggir (*fringe connect*) dan organisasi pinggir (*fringe organization*) menjadi kekuatan politik arus utama (*mainstream*).

Protes umat Islam Indonesia secara tidak langsung telah mengakomodir kekuatan pemilih muslim di Jakarta agar tidak memilih Ahok. Seperti disebutkan di atas, gerakan jaringan demonstrasi ini diinisiasi oleh kelompok organisasi pinggir (*fringe organizations*) yang kemudian menjadi kekuatan arus utama, seperti FPI (Front Pembela Islam), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Forum Umat Islam (FUI), dan bermacam kelompok Islam lainnya.

Bahkan, FPI secara terang-terangan menginstruksikan anggotanya di Jakarta untuk memilih pemimpin Muslim, yakni Anies-Sandi

dan Agus-Sylvi. Menurut FPI, perjuangannya untuk menuntut pemimpin Muslim karena secara demografis Islam adalah mayoritas, dijamin oleh konstitusi. Bagi mereka, perjuangan tersebut ialah "jihad" konstitusional. Selain itu, FPI menganggap bahwa kegaduhan Pilkada Daerah Khusus Ibukota Jakarta disebabkan inkonsistensi banyak kalangan atas "jihad" konstitusional mereka. Jihad konstitusional yang dimaksud adalah berjuang dengan sungguh-sungguh sesuai konstitusi dan demokrasi. Karena memilih calon muslim adalah hak seorang muslim sehingga tidak perlu dicampuri oleh pihak lain (*Rekaman Wawancara dengan Elite Front Pembela Islam*).

Serangkaian Aksi Bela Islam ialah representasi nyata dari politik identitas yang senantiasa menguat. Walaupun secara substansial, demonstrasi demikian memiliki tujuan penegakan hukum, namun tidak bisa dipungkiri bahwa potensi politis terus berkembang pada aksi umat Islam yang jumlahnya jutaan tersebut. Potensi politik inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk memobilisasi pemilih Muslim Jakarta untuk mengalahkan Ahok. Dalam waktu yang sama, citra Anies-Sandi dimunculkan sebagai figur muslim, sopan dan mengayomi. Bahkan, Anies-Sandi beberapa kali menghadiri pertemuan dengan kelompok Islam kanan ini. Misalnya demonstrasi 212, dengan jutaan umat yang terlibat, terlihat bahwa mereka dengan keras menolak Ahok. Bahkan, demonstrasi itu secara terang-terangan menolak dipimpin oleh pemimpin selain Muslim. Penolakan demikian itu merupakan pernyataan politik yang memiliki dampak elektoral di

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Momentum ini kemudian dimanfaatkan oleh pasangan Anies-Sandi. Dalam tulisannya, Supriatma, (2017) mengungkapkan bahwa kampanye Anies-Sandi mampu mengkapitalisasi serentetan Aksi Bela Islam tersebut menjadi suara pemilih. Menurut Supriatma, kampanye kandidat Anies-Sandi dirancang menggunakan strategi dua tombak (*two-pronged- strategy*). Strategi pertama, Anies-Sandi ditampilkan sebagai figur yang bersih, citra ini ditampilkan sejak awal kampanye. Anies-Sandi menawarkan kesan santun, toleran, dan tidak rasis. Strategi kedua, kampanye yang terorganisir dengan rapi melalui kekuatan simpul-simpul kelompok umat Islam.

Keuntungan elektoral daripada rentetan Aksi Bela Islam memang secara khusus merupakan hal yang ingin dicapai oleh kalangan inisiator demonstrasi. Buktinya, FPI secara terang-terangan mengucapkan bahwa keuntungan politis dari Aksi Bela Islam merupakan sesuatu yang sah, selama yang diuntungkan merupakan pemimpin Muslim. Saat Pilkada Daerah Khusus Ibukota Jakarta putaran pertama, kandidasi yang berasal dari basis Islam ialah Agus-Sylvi dan Anies-Sandi. Kendati demikian, menurut FPI, suara sebagian Muslim Jakarta banyak mengerucut pada pasangan Anies-Sandi (Wawancara penulis dengan Front Pembela Islam (FPI)). Pada konteks ini, penyebab konstituen Muslim Jakarta memilih Anies-Sandi dikarenakan oleh personalisasi dirinya yang dicitrakan kontradiktif dengan Ahok. Anies di mata publik Jakarta

hadir sebagai alternatif calon yang santun, tidak rasis, dan ramah.

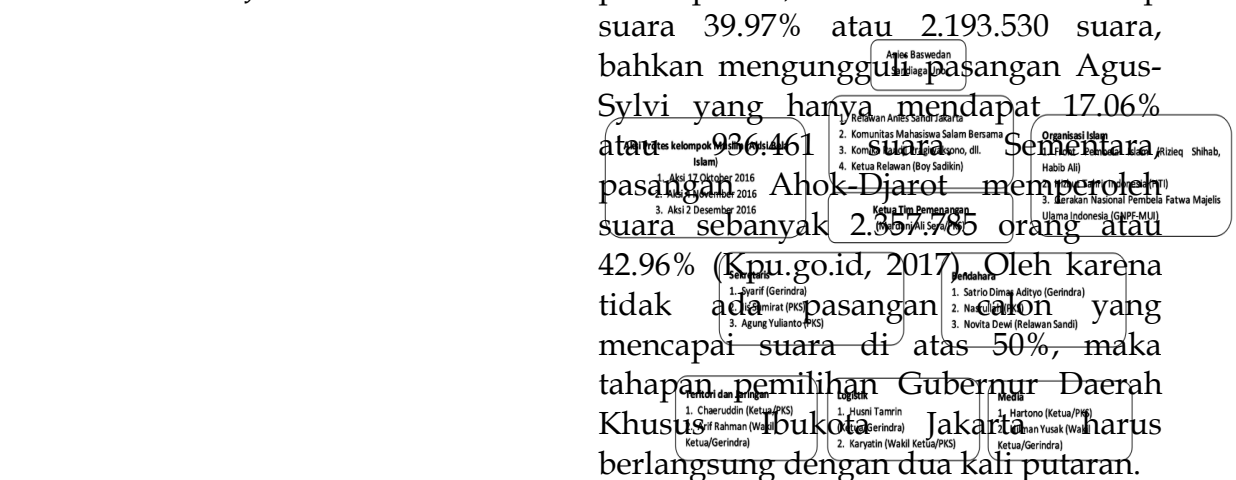
Skema pemenangan pasangan Anies-Sandi pada Pilkada Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah bukti keberhasilan populisme Islam di Indonesia. Populisme merupakan bentuk perlawanan rakyat bawah (*grass root*) yang dianggap salih dan baik terhadap kaum atas (*elite*) yang dianggap koruptif (Hadiz, 2019). Pada kasus Pilkada Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2017-2022, ikatan jejaring kelompok Muslim hadir sebagai simpul politik arus bawah dengan menunjukkan transformasi sosial-politik yang spesifik, yakni mengganti Ahok. Instrumentalisasi sentimen keagamaan yang eksklusif dan rasialis tampak pada gerakan gaya gerakan populis ini. Tentu saja, model populisme Islam ini akan juga dihadirkan pada setiap kontestasi politik Tanah Air, termasuk dalam Pemilu 2019. Kemenangan Anies-Sandi melalui populisme Islam berpotensi akan dijadikan sebagai *role model* pemenangan calon pemimpin di kancah politik Indonesia.

Strategi Pembentukan Jejaring Konstituen Anies-Sandi Pada Pilkada Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2017

Kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah momentum politik nasional yang menampilkan fenomena menarik. Semakin menarik lagi karena konfigurasi kekuatan politik masing-masing pasangan calon tidak semata-mata hanya memanfaatkan jaringan politik formal belaka seperti pada Pilkada Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2007 dan 2012,

namun juga menggunakan simpul jaringan politik non-formal.

Berikut ini merupakan skema pembentukan jejaring konstituen Anies-Sandi ketika Pilkada Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2017:



Gambar 1. Skema Jejaring Politik Anies-Sandi Diolah oleh peneliti

Jejaring konstituen tersebut berhasil memenangkan pasangan Anies-Sandi di Pilkada Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2017. Seperti maffhum diketahui bahwa Pemilihan Kepala Daerah DAERAH KHUSUS IBUKOTA Jakarta 2017 diikuti oleh tiga kandidat pasangan calon, yakni Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahja Purnama-Djarot Saifullah Yusuf, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Kandidat tersebut bertarung dengan dukungan formal berupa partai politik. Saat putaran pertama, Pasangan Agus-Sylvi didukung oleh Partai Demokrat, Partai Keadilan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara pasangan Ahok-Djarot didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Terakhir, Anies-Sandi mendapatkan dukungan politik dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hanya dengan dukungan dua partai politik, Anies-Sandi bisa meraup suara 39.97% atau 2.193.530 suara, bahkan mengungguli pasangan Agus-Sylvi yang hanya mendapat 17.06% atau 936.461 suara. Sementara pasangan Ahok-Djarot memperoleh suara sebanyak 2.377.05 orang atau 42.96% (Kpu.go.id, 2017). Oleh karena tidak ada pasangan calon yang mencapai suara di atas 50%, maka tahapan pemilihan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus berlangsung dengan dua kali putaran.

Kemenangan Anies-Sandi saat Pilkada Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2017-2022 menandakan bahwa instrumen politik formal dan non-formal menjadi medium keberhasilan elektoral pasangan yang diusung Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. Karena demikian, strategi politik pasangan Anies-Sandi, bagi penulis, akan diuraikan untuk melihat secara detail skema kemenangannya. Strategi politik Anies-Sandi sebagai keseluruhan keputusan kondisional untuk mengakomodir kemenangan dan cita-cita politik.

Menurut Peter Schroder, terdapat 3 fase utama dalam strategi politik, yaitu fase analisa situasi, fase keputusan strategis, dan fase implementasi strategis (Schroder, 2009, p. 5). Meski demikian, ketiga fase tersebut akan diuraikan berdasarkan temuan sebagaimana akan dijabarkan berikut.

Ketika kampanye politik, strategi yang dijalankan Anies-Sandi ada dua hal, terutama melalui *grand campaign*

yaitu dengan serangan darat dan udara. Mardani Ali Sera selaku Ketua Tim Pemenangan menerangkan bahwa serangan darat adalah dengan menyediakan relawan di 12.504 TPS. Menurut Mardani, Tim Teritori akan menyediakan untuk RW dan penggerak pemilih di setiap gang. Kemudian, strategi serangan udara dijalankan melalui media sosial, media konvensional, dan data saksi pemilih (CNN Indonesia, 2017).

Terdapat 4 (empat) program prioritas yang disampaikan pasangan Anies-Sandi saat kampanye politik mereka. Pertama, program *One Kecamatan One Centre for Entrepreneurship* (OK OCE). Kedua, rumah DP 0 rupiah. Ketiga, Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) dan Kartu Jakarta Sehat Plus (KJS Plus) Keempat, kampanye pasangan Anies-Sandi adalah menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta.

Intinya, kampanye politik Anies-Sandi yang dicitrakan sejak awal adalah agenda kontra naratif dengan kebijakan non-populis Ahok-Djarot. Terutama, yang paling populer dan sukses menarik banyak dukungan adalah soal pengurusan. Bahkan, *tagline* kampanye Anies-Sandi secara khusus menyorot kebijakan terkait pengurusan, yaitu "Membangun Tanpa Menyakiti".

Koalisi parpol pada Pemilihan Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta bisa ditelaah melalui *Coalition Formation Theory*, yang mana, kedua poros itu menggunakan pendekatan yang berlainan ketika memenangkan Pilkada Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pihak Basuki-Djarot, nampaknya lebih mengedepankan bagaimana memenangkan pertarungan

ini. Kondisi ini sejalan dengan paham *office-oriented*, di mana mereka mencoba mengumpulkan sebanyak-banyaknya dukungan koalisi partai. Basis konstituen Partai Keadilan Bangsa (PKB) merupakan kalangan Nahdatul Ulama (NU) Jakarta dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah kalangan tradisional. Meski ada pola tidak *linier* antara dukungan elite partai dengan dukungan pemilih akar rumput (*grass root*) kedua partai tersebut karena alasan identitas politik.

Sementara itu, pasangan Anies-Sandi lebih merujuk pada *policy-oriented*, yakni dengan memaksimalkan koalisi yang minim namun mengedepankan faktor-faktor efektivitas dan efisiensi kebijakan yang diambil ketika nanti terpilih. Karena itu, operasi politik parpol pendukungnya, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan terakhir Partai Amanat Nasional (PAN), akan mengoptimalkan di ranah akar rumput lewat jalur instrumen politik formal ataupun informal. Konfigurasi partai politik pendukung Anies-Sandi juga ditampilkan oleh partai politik non parlemen, yakni Partai Perindo dan Partai Idaman. Anies-Sandi merampungkan agenda pemenangannya waktu itu melalui dua porsi utama, yakni porsi jaringan partai politik koalisi serta porsi program kerja.

SIMPULAN

Praktik populisme Islam merupakan ekspresi politis dari penolakan masyarakat muslim terhadap elite yang berkuasa. Pada konteks Pemilihan Kepala Daerah

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang selaku petahana merepresentasikan elite yang harus dimusuhi. Kemenangan Anies-Sandi secara mendasar tidak bisa dilepaskan dari faktor agama. Pilkada Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2017 memperlihatkan bukti konkret bahwa preferensi utama masyarakat yang memilih pasangan Anies-Sandi saat Pilkada Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2017 di putaran yang kedua adalah agama. Dengan demikian, dapat ditarik disimpulkan bahwa simpul konstituen pasangan Anies-Sandi adalah identitas agama.

DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia. (2016). Kuda Troya Sentimen SARA di Pilkada Jakarta. Retrieved November 20, 2018, from CNN Indonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/kursipanasDaerahKhususIbukota1/20161118102640-516-173506/kuda-troya-sentimen-sara-di-pilkada-jakarta>
- CNN Indonesia. (2017). Tiga Strategi Kampanye Pilkada DAERAH KHUSUS IBUKOTA Tim Pemenangan Anies-Sandi. Retrieved April 26, 2018, from CNN Indonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161007001700-32-163861/tiga-strategi-kampanye-pilkada-DaerahKhususIbukota-tim-pemenangan-anies-sandi>,
- Hadiz, V. R. (2019). *Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah* (Edisi Pert; I. Ahmad, Ed.). Jakarta: LP3ES.
- Hakim, R. N. (2016). Fahri Hamzah: Dua Cara Jatuhkan Presiden, lewat Parlemen Ruangan atau Jalanan Fahri Hamzah: Dua Cara Jatuhkan Presiden, lewat Parlemen Ruangan atau Jalanan. Retrieved November 22, 2017, from Kompas.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2016/11/04/19551281/fahri.hamzah.dua.cara.jatuhkan.president.lewat.parlemen.ruangan.atau.jalanan?page=all>.
- Ibrahim, G. M. (2016). Survei Poltracking: Publik Masih Puas dengan Kinerja Ahok-Djarot. Retrieved May 5, 2018, from detiknews website: <https://news.detik.com/berita/d-3356059/survei-poltracking-publik-masih-puas-dengan-kinerja-ahok-djarot.diakses>
- Juditha, C. (2017). HATESPEECH di MEDIA ONLINE: KASUS PILKADA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 2017 HATESPEECH IN ONLINE MEDIA: JAKARTA ON ELECTION 2017. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 21(2), 137-151. Retrieved from <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jpkop/article/view/1134/719>
- Katadata. (2017). *SMRC: Seagama, Alasan Utama Memilih Anies-Sandi*. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/04/13/smrc-seagama-alasan-utama-memilih-anies-sandi>
- Kpu.go.id. (2017). Pilkada DAERAH KHUSUS IBUKOTA Jakarta Putaran Kedua Rekapitulasi pilkada DAERAH KHUSUS IBUKOTA Jakarta Putaran Kedua berdasarkan form C1. Retrieved April 25, 2018, from kpu.go.id website: <https://pilkada2017.kpu.go.id/>
- KPU. (2017a). *PILKADA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA*. Retrieved from https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t1/DaerahKhususIbukota_jakarta
- KPU. (2017b). *PILKADA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (Putaran Kedua)*. Retrieved from https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/2/t1/DaerahKhususIbukota_jakarta
- Kusumo, R., & Hurriyah, H. (2018). Populisme Islam di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI Tahun 2016-2017. *Jurnal Politik*, 4(1), 87-144. <https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.172>
- Malaikat, B. (2018). *Anies Baswedan Temui HABIB Rizieq Shihab STOP REKLAMASI*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=XKNQT43mCGk>
- Median. (2017). *SURVEI PILGUB DAERAH KHUSUS IBUKOTA 2017 "MEMAHAMI PETA KOMPETISI PUTARAN KE-2 PILGUB DAERAH KHUSUS IBUKOTA"*. Retrieved from

- <https://www.median.or.id/wp-content/uploads/2017/03/PRESS-RELEASE-PILKADA-DAERAH-KHUSUS-IBUKOTA-PUTARAN-2.pdf>
- Pamungkas, A. S., & Oktaviani, G. (2017). Aksi Bela Islam dan Ruang Publik Muslim: Dari Representasi Daring ke Komunitas Luring. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(2), 65-87.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28581>
- Prayogi, I., & Adela, F. P. (2019). Populisme Islam dan Imajinasi Politik dalam Pilkada DAERAH KHUSUS IBUKOTA Jakarta 2017. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 11(2), 31-43.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32734/politeia.v11i2.1083>
- Schroder, P. (2009). *Strategi Politik*. Jakarta: Frederich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit.
- Solehudin, I. (2017). Kata Habib Rizieq, 19 April Bukan Pertarungan Anies atau Ahok. Retrieved April 8, 2017, from JawaPos.Com website:
<https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/20/03/2017/kata-habib-rizieq-19-april-bukan-pertarungan-anies-atau-ahok/>
- Supriatma, M. (2017). Pasang Naik Populisme Kanan. Retrieved May 1, 2018, from Indoprogres.Com website:
<https://indoprogres.com/2017/12/pasang-naik-populisme-kanan>
- Widhana, D. H. (2016). Para Politikus yang Mencari Panggunng di Demo 4 November. Retrieved April 20, 2018, from Tirto.id website:
<https://tirto.id/para-politikus-yang-mencari-panggung-di-demo-4-november-b2By>
- Yulika, N. C. (2017). Alasan Warga DAERAH KHUSUS IBUKOTA Memilih Anies-Sandi Versi SMRC dan Populi Center. Retrieved April 20, 2018, from liputan6.com website:
<https://www.liputan6.com/pilkada/read/2927828/alasan-warga-Daerah-Khusus-Ibukota-memilih-anies-sandi-versi-smrc-dan-populi-center>